

# TINJAUAN KRITIS TERHADAP KECENDERUNGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA MASA KINI

Oleh:  
Slamet Subekti

## ABSTRACT

*Exercise about Indonesian historiography is interesting, actually to see direction among historian works. As we have seen through library study that modern Indonesian historiography developed by academic historian became Indonesia-centric historiography circa late 1970s. But it's disappointed, because failed to respond our problems, such as: how history contributes to an effort for overcome socio-political constrain our nation? Today, more historians aware for need to developing alternative historiography, it benefits for nation enlightenment and respond to future challenges.*

***Keywords: historiography, liberation historiography***

## **A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini mengangkat historiografi dalam kaitannya dengan lontaran kritik kepada sejarawan akademis yang antara lain menyatakan bahwa saat ini tulisan-tulisan para sejarawan akademis tidak mengakar dalam persoalan sosial, sehingga tidak mampu mencerahkan masyarakat dan tidak memiliki sumbangan apa-apa terhadap pemecahan persoalan kekinian apalagi untuk masa yang akan datang (Purwanto, 2004).

Istilah historiografi dalam khazanah ilmu sejarah, digunakan untuk menyebut langkah terakhir dari metode penelitian sejarah, yaitu proses menyusun secara tertulis hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam satu penelitian sejarah menjadi cerita yang siap untuk dibaca para pembacanya. Proses penyusunan hasil-hasil temuan penelitian sejarah itu juga sering disebut sebagai proses rekonstruksi sejarah dengan asumsi bahwa masa lampau sebagai aktualitas merupakan sebuah konstruksi sebagai hasil dari proses-proses sosial dengan segala kompleksitasnya dalam satu komunitas manusia (Garraghan, 1957:396). Oleh karena itu, istilah historiografi sering digunakan untuk menyebut hasil penelitian dan penulisan sejarah. Istilah ini bahkan digunakan untuk menyebut tulisan sejarah atau cerita sejarah yang berbentuk tulisan.

Kajian ini berusaha untuk mencermati kecenderungan historiografi Indonesia masa kini. Pembahasan akan diawali dengan garis besar perkembangan historiografi Indonesia, dilanjutkan dengan pemikiran tentang historiografi alternatif, dan diakhiri dengan simpulan.

## **B. METODE**

Kajian ini dilakukan dengan studi pustaka. Langkah pertama, dilakukan pembacaan atas referensi tentang historiografi umum dari sumber buku teks maupun *website*, dan khususnya berkenaan dengan historiografi Indonesia, terutama tulisan Bambang Purwanto (*Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, 2006) dan Singgih Tri Sulistiyono (*Historiografi Pembebasan untuk Indonesia Baru*, 2008). Langkah kedua, dilakukan analisis dan sintesis atas pembacaan referensi tersebut. Langkah ketiga, dilakukan refleksi atas hasil analisis dan sintesis tersebut, dan akhirnya dilakukan penulisan naratif.

## **C. PERKEMBANGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA**

Usaha penulisan sejarah bangsa kita, dalam artian historiografi modern, telah dilakukan pada zaman penjajahan berupa sejarah Hindia-Belanda (*Geschiedenis van Nederlands-Indie*) sejumlah 5 jilid. Jilid satu tentang prasejarah, jilid dua tentang sejarah Hindu-Jawa, jilid tiga tentang pembentukan VOC, dan jilid empat tentang sejarah Hindia Belanda abad ke-18. Jilid lima ditulis oleh F.W. Stappel terbit tahun 1943, ketika Belanda diduduki Jerman dan kepulauan Indonesia diduduki Jepang. Oleh karena itu, jilid lima ini tidak beredar di Indonesia. Tentu saja, kecenderungan penulisan buku tersebut didasarkan perspektif kolonial Belanda (Purwanto dan Asvi, 2005: 103).

Setelah kemerdekaan Indonesia, mulai disadari kebutuhan akan penulisan buku sejarah oleh anak bangsa. Penulisan sejarah oleh orang Belanda berfokus pada masyarakat Belanda di negara koloni atau di Eropa. Sekiranya terdapat pembahasan tentang bumiputera tentunya dari perspektif Barat (Van Leur, misalnya). Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk menulis sejarah oleh orang Indonesia sendiri sebagai *history from within*. Terjadi dekolonisasi sejarah, dengan motivasi menggantikan buku teks Belanda. Penulisan sejarah ini dilakukan melalui penyaduran dengan membalikkan posisi pelaku sejarah. Model historiografi Indonesia tahun 1957 bergeser

dari Belandasentris menjadi Indonesiasentris. Label “pemberontak” bagi Belanda seperti Diponegoro misalnya, berganti menjadi “pahlawan” bagi kita (Piliang, 2001:2). Akan tetapi, dekolonisasi penulisan sejarah ini cenderung menjadi regionalisasi, dalam hal ini pokok pembahasannya lebih banyak tentang Jawa (Jawasentris).

Sejak tahun 1950-an dirintis penulisan sejarah nasional namun gagal, dan baru dilakukan secara serius sesuai Seminar Sejarah Nasional II (Yogyakarta, 1970). Pemerintah membentuk tim yang dipimpin Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Buku itu terdiri 6 jilid: prasejarah, sejarah kuno, kerajaan-kerajaan Islam, periode 1800-1900, 1900-1942 dan 1942-1965 (Purwanto dan Asvi, 2005: 104-105).

Setelah empat tahun mengadakan penelitian, termasuk studi banding di AS (Berkeley) dan Belanda (Leiden), tahun 1975 terbit buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) yang membuahkan kontroversi. Konflik sudah dimulai dalam lingkungan tim penyusunnya. Deliar Noer yang ditugasi menulis “pergerakan Islam 1900-1945”, satu hari dipanggil Nugroho Notosusanto dan diminta mengundurkan diri. Mundurnya Deliar diikuti oleh Abdurrahman Surjomihardjo, Thee Kian Wie, Taufik Abdullah dan kemudian, Sartono Kartodirjo. Pada kenyataannya, buku SNI ini membuahkan banyak kritik terutama jilid 6 yang disunting oleh Nugroho Notosusanto. Tahun 1993 sempat dilakukan revisi oleh RZ Leiressa, Anhar Gonggong dan kawan-kawan, namun akhirnya buku itu tidak diedarkan.

#### **D. MENUJU HISTORIOGRAFI ALTERNATIF**

Sekiranya benar sinyalemen bahwa arah perjalanan historiografi (penulisan sejarah) Indonesia saat ini telah tercerabut dari konteks masyarakatnya, dan historiografi kembali berubah menjadi cerita tentang barang antik yang tidak memiliki relevansi dengan persoalan aktual yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, sejarah hanya “sekedar alat pembenar yang hanya mampu berdialog dengan diri sendiri dan takut pada penindasan serta kezaliman politis” (Purwanto, 2006: 47). Padahal diyakini bahwa seharusnya sejarah bukan untuk kepentingan orang yang hidup pada masa lampau itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masa kini dan mendatang (Meyerhoff, 1959: 44). Oleh karena itu, tidak ada waktu lagi bagi sejarawan dan siapa pun yang peduli terhadap masa depan bangsa Indonesia untuk tidak menggagas satu historiografi alternatif yang mampu memberikan sumbangan tertentu untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa yang saat ini sedang berjuang mempertahankan eksistensi dan keberlangsungannya.

Historiografi alternatif bermaksud mengenalkan perspektif yang terabaikan, terlewatkan atau tidak terlihat. Pada gilirannya historiografi alternatif akan menghasilkan sejarah alternatif, yang mengacu pada sejarah yang dituturkan dari sudut pandang berbeda, alih-alih dari sudut pandang (baik secara eksplisit maupun implisit) para imperialis, penakluk, atau penjajah. Misalnya, Sejarah Rakyat Amerika Serikat memberikan pandangan yang simpatik kepada orang-orang pribumi Amerika.

Sejarah alternatif dibagi menjadi dua macam: Pertama, *pembaruan sejarah* yaitu pengkajian ulang dari fakta-fakta dan penafsiran sejarah untuk memperbaiki sejarah yang tertulis dengan informasi baru yang lebih tepat dan lebih tidak berprasangka atau menyimpang. Kedua, ketika pembaruan ini dilakukan oleh pihak tertentu hal ini disebut *pembaruan sejarah secara politis*, sebagai contoh perekaan ulang kejadian di masa lalu yang disangkal oleh sumber-sumber yang terdokumentasi yang kesahihannya dapat dibuktikan. Untuk menghapus bukti akan

perekaan ulang, sejarah seperti itu biasanya menyalahkan kurangnya ilmu atau dokumentasi pada satu konspirasi.

Kajian tentang historiografi alternatif ini akan difokuskan pada pemikiran Bambang Purwanto di satu pihak, dan pemikiran Singgih T. Sulistiyono di lain pihak.

### **1. Kritik Bambang Purwanto terhadap Historiografi Indonesiasentris**

Melalui kata pengantar bukunya *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris* (2006), Bambang Purwanto menuliskan bahwa disorientasi mungkin label yang tepat untuk menggambarkan historiografi Indonesia masa kini. Mengapa demikian? Hal ini dapat dicermati bahwa Indonesiasentrisme yang selama ini dianggap sebagai identitas historiografi Indonesia ternyata tidak lebih dari sebuah label tanpa makna yang jelas, kecuali sebagai antitesa dari koloniasentrisme yang melekat pada historiografi sebelumnya. Dekolonisasi yang dijadikan prinsip dasar Indonesiasentrisme sebagai cara pandang orang Indonesia tentang masa lalunya sendiri, seolah-olah telah membangun wacana sekaligus perspektif yang menjadikan historiografi sekadar sebagai alat penghujat dan menggunakan masa lalu sebagai tameng membenaran (Purwanto, 2006: xii).

Disinyalir tidak banyak orang menyadari bahwa prinsip dekolonisasi itu telah mengakibatkan sebagian besar pemahaman tentang sejarah Indonesia cenderung anakronis. Mereka menafikan banyak realitas yang dikategorikan sebagai bagian dari kultur kolonial, dan menganggap hal itu hanya sebagai bagian dari sejarah Belanda atau sejarah para penjajah yang tidak ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Padahal sebagai sebuah proses, realitas-realitas itu sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia.

Sebaliknya tradisi itu menganggap bahwa realitas-realitas lain sebagai realitas Indonesia hanya karena sebagai masa lalu realitas itu terjadi di Indonesia sebagai sebuah unit geografis. Padahal secara konseptual, realitas itu tidak dapat dikategorikan sebagai masa lalu Indonesia. Selain itu, prinsip dekolonisasi yang sebenarnya hanya tepat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu yang berkaitan dengan periode dominasi Barat di Indonesia, ternyata digunakan untuk merekonstruksi masa lalu di luar periode itu, baik periode prakolonial maupun masa pascakolonial. Cara pandang itu telah mengakibatkan berkembangnya historiografi Indonesia yang menjauh dari tradisi sejarah kritis, dan sebaliknya menghadirkan historiografi parsial yang penuh dengan muatan politis-ideologis yang tidak mengakui keragaman pandangan dalam konstruksi dan pemaknaan terhadap masa lalu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, patut dipertanyakan: Apakah tradisi historiografi Indonesiasentris telah gagal merekonstruksi masa lalu Indonesia? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Pada satu sisi, mengatakan Indonesiasentrisme gagal secara keseluruhan tentu saja berlebihan, karena sampai tingkat tertentu historiografi ini telah berhasil menghadirkan unsur keindonesiaan baik sebagai aktor masa lalu maupun perspektif dalam konstruksi dan makna yang dibangun.

Pada lain sisi, buku *Sejarah Nasional Indonesia* yang banyak dikritik itu pun sebenarnya mampu menghadirkan secara konseptual prinsip keindonesiaan yang dilandasi oleh kaidah keilmuan. Periodisasi dan kerangka berpikir teoretik konseptual yang dirumuskan secara jelas oleh editor utama yang dimotori oleh Sartono Kartodirdjo, menunjukkan kematangan intelektual daripada sekadar emosional, terlepas dari persoalan yang ada, terutama pada jilid 6 dan keberadaan jilid 7 yang terkesan malu-malu. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Historiografi Indonesiasentris telah gagal.

## **2. Tawaran Historiografi Pembebasan Singgih Tri Sulistiyono**

Konsep “historiografi pembebasan” ditawarkan sebagai satu corak historiografi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran historis, aktual, dan sekaligus futural bagi segenap masyarakat Indonesia. Pada gilirannya, historiografi pembebasan digunakan untuk membangkitkan semangat bergerak membebaskan diri dari berbagai persoalan yang hingga saat ini tidak terpecahkan. Historiografi pembebasan ini diharapkan dapat berperan sebagai satu historiografi yang mampu membebaskan cara berpikir masyarakat terhadap masa lampau dari belenggu ketidaktahuan, kepalsuan, mitos-mitos, manipulasi, dan kesalahtafsiran aktual mengenai masa lampau sehingga memberikan spirit untuk bertindak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan akar historis (Sulistiyono, 2008: 5).

### **2.1 Pengertian**

Menurut Sulistiyono, penggunaan istilah “pembebasan” dalam konsep historiografi pembebasan mengacu kepada karya sejarah yang bukan sekadar sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang, melainkan satu karya sejarah yang mampu membangkitkan kesadaran terhadap masalah aktual yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Perpaduan antara kesadaran sejarah dan kesadaran aktual serta kesadaran futural itu pada gilirannya akan mendorong semangat masyarakat untuk melakukan suatu langkah perbaikan demi mencapai cita-cita Indonesia Baru sebagai komunitas bangsa yaitu masyarakat yang makmur, berkeadilan, mandiri, bebas dari penindasan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, historiografi pembebasan ini akan membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, ketergantungan, ketidakadilan, penindasan dan lain-lain. Selama ini, lemahnya semangat untuk membebaskan diri dari belenggu itu semua disebabkan oleh salah pemahaman terhadap masa lampau dan masa kini, bahwa kita sudah merasa merdeka, sudah merasa kecukupan, berkeadilan, bebas dari belenggu penindasan, dan sebagainya. Dengan demikian, historiografi pembebasan ini lebih banyak menyangkut upaya pemikiran: Bagaimana historiografi memiliki fungsi yang signifikan dalam ikut memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini dan mendatang?

### **2.2 Landasan Filosofis**

Sementara ini historiografi pembebasan belum pernah digunakan secara khusus dalam kajian historiografi. Namun demikian, sejauh hal itu menyangkut fungsi praktis historiografi secara umum, para sejarawan, guru sejarah, dan terutama filsuf sejarah secara jelas mengakui adanya fungsi historiografi dalam kehidupan masyarakat. Ibrahim Alfian dalam pidato pengukuhan guru besar di Universitas Gadjah Mada telah menyitir pendapat Wang Gungwu, bahwa ada tiga kegunaan sejarah (Sulistiyono, 2008:18).

Kegunaan pertama, sejarah untuk melestarikan identitas kelompok (keluarga, klan, suku bangsa, bangsa) untuk memperkuat daya tahan kelompok dan kelangsungan hidupnya. Kegunaan kedua, sejarah sebagai pelajaran untuk mengambil suri teladan peristiwa masa lampau. Peristiwa kegagalan tidak perlu diulangi, sedangkan peristiwa gemilang dapat ditiru dan disempurnakan. Kegunaan ketiga, sejarah sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup dan mati. Selain itu, Alfian juga menambahkan satu fungsi sejarah yaitu sebagai alat pemenuhan rasa ingin tahu sejarawan dan para peminat sejarah.

Arti penting historiografi sebagai sarana untuk mencari hikmat dari peristiwa masa lampau dapat ditemukan dalam karya filsuf Collingwood (Collingwood, 1973: 10). *'knowing yourself means knowing what you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done'*

(memahami diri anda sendiri berarti memahami apa yang dapat anda kerjakan; dan oleh karena tidak seorang pun tahu apa yang dapat ia kerjakan hingga ia mencobanya, maka satu-satunya kunci untuk mengetahui apa yang dapat ia kerjakan adalah apa yang telah dikerjakan oleh orang).

Demikianlah, jika satu bangsa ingin tahu apa yang sebaiknya dikerjakan saat ini dan yang akan datang secara optimal, maka bangsa itu harus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Dengan kata lain, mereka harus belajar dari sejarah bangsanya.

Pertanyaan mendasar dalam konteks keindonesiaan adalah: Bagaimana corak historiografi yang mampu membangkitkan kesadaran masa lampau untuk memahami masa kini secara benar, dan selanjutnya bertindak demi masa depan yang lebih baik? Sehubungan dengan itu, ditawarkannya historiografi pembebasan diharapkan mampu membebaskan cara berpikir masyarakat yang terbelenggu oleh ketidaktahuan dan kesalahpahaman terhadap masa lampau sehingga salah dalam memahami masa kini. Jika masyarakat tidak dibebaskan dari belenggu-belenggu berhala masa lampau ini, maka mereka tidak akan dapat memahami secara tepat kondisi kekinian, apalagi masa yang akan datang.

### **2.3 Landasan Metodologis dan Epistemologis**

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori atau teori-teori mengenai pengetahuan, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui dunia. Berbagai pertanyaan utama yang akan dijawab dalam epistemologi ini antara lain mengenai asal-usul pengetahuan, kedudukan pengalaman dalam melahirkan pengetahuan, kedudukan akal dalam pengetahuan, dan sebagainya. (Blackburn, 1994: 123). Sehubungan dengan itu, pertanyaan kunci dalam hal ini adalah: Di atas landasan epistemologi apa historiografi pembebasan ini dibangun? Selanjutnya, perspektif apa yang diperlukan untuk mengkaji sejarah Indonesia sehingga menghasilkan historiografi pembebasan yang memiliki kemanfaatan dalam menyelesaikan persoalan bangsa dewasa ini?

Singgih T. Sulistiyono sepakat dengan ajakan Bambang Purwanto untuk mengembangkan kesadaran dekonstruktif dalam historiografi guna mendobrak kebekuan dan disorientasi historiografi Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, menarik apa yang dikemukakan oleh Jacques Derrida, seorang pemikir Pascastrukturalis bahwa "semua teks harus selalu dipertanyakan kebenarannya", karena sesungguhnya membaca teks secara kritis merupakan permulaan penemuan kebenaran sejarah. Dalam hal ini, karya historiografi yang ada juga harus dipandang sebagai teks yang harus diragukan kebenarannya dan kalau perlu dibongkar kembali. Dengan demikian penulisan kembali sejarah (*rewriting history*) merupakan suatu keniscayaan, bukan barang tabu yang dapat dipaksakan secara politis (Sulistiyono, 2006: 26-27).

Karena usaha para sejarawan akademik untuk melakukan dekonstruksi terhadap historiografi yang ada selama ini lebih banyak berfungsi sebagai pelipur lara dan hanya meninabobokan sebagian besar masyarakat Indonesia yang sedang menjerit menghadapi situasi sulit, maka historiografi pembebasan harus berani menempatkan kondisi aktual dan kontekstual sebagai *point of departure*. Hanya dengan cara itu, karya historiografi memiliki hubungan yang erat dengan persoalan kekinian. Dalam hubungan itu, penelitian sejarah tidak harus hanya menggunakan metodologi dan epistemologi yang digunakan dalam paradigma positivisme yang

memperlakukan sumber-sumber sejarah secara eksak dan kuantitatif dan dianggap “dapat berbicara sendiri” sebagaimana yang terjadi dalam ilmu alam.

Metodologi positivis berakar pada pemikiran teoretis Comte dan Durkheim yang memandang fakta sosial sebagai keadaan objektif yang terlepas bahkan berada di luar keadaan subjektif individu, tetapi berpengaruh dan memaksakan pengaruh dari luar. Dalam hal ini, mereka sangat percaya pada kriteria *rigor*, yaitu kesahihan eksternal dan internal, keandalan dan objektivitas. Metodologi ini sangat berpengaruh terhadap penelitian sejarah sejak abad ke-19 dengan tokoh utama Leopold von Ranke yang ingin menulis sejarah “*as it actually happened*”. Seleksi yang sangat ketat diberlakukan untuk sumber sejarah, sehingga hanya sumber tertulis saja yang dapat digunakan. Dalam konteks itu, muncul dalil bahwa: “*no (written) document, no history.*”

Menurut Singgih T. Sulistiyono, usaha pengembangan historiografi pembebasan bukan hanya berdasarkan paradigma positivis, melainkan perlu menerapkan paradigma lain yang juga digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, paradigma teori kritis sangat bermanfaat untuk keperluan tersebut. Secara umum teori kritis dalam konteks ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses kritis untuk mendorong kesadaran orang agar memiliki kemampuan untuk “menghadapi” kondisi struktural yang mendominasi, menekan bahkan mengeksploitasi. Tampak jelas, bahwa pendekatan teori kritis mempunyai komitmen yang tinggi pada terbangunnya tata kehidupan sosial yang setara (*equal*), berkeadilan dalam arti terbebas (misi pembebasan) dari suatu sistem yang mendominasi/diskriminatif, represif dan eksploitatif. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa ilmu sosial mestinya bukan hanya sekadar memberi pemahaman atas ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan distribusi *resources*, melainkan seharusnya berusaha untuk ikut membantu menciptakan kesetaraan dan kemajuan (emansipasi) dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, teori kritis tampaknya juga memiliki keterikatan moral untuk mengkritik *status quo* dan membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkeadilan.

Sejalan dengan paradigma teori kritis dalam studi sosiologi, historiografi pembebasan juga memiliki perhatian utama untuk membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan, dan manipulasi masa lampau yang menyebabkan kesalahan dalam memahami kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, historiografi pembebasan memiliki misi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan aktual yang mereka hadapi sehingga memberikan inspirasi untuk melakukan suatu perbaikan demi mencapai masa depan yang gemilang. Persoalan-persoalan aktual yang dapat dianalisis secara historis antara lain menyangkut kemiskinan, ketidakadilan, dominasi, eksploitasi, diskriminasi (ras, gender, kepercayaan, dan sebagainya), manipulasi, represi birokrasi dan sebagainya. Hanya dengan kesadaran semacam itu, masyarakat Indonesia akan meyakini dan kemudian tergerak untuk melakukan *action*. Dengan demikian, sejalan dengan apa yang dikatakan Sartre tersebut di atas, historiografi pembebasan juga dimaksudkan untuk ambil bagian dalam memerangi ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, perjuangan untuk kebenaran, keadilan, kemajuan, dan hak asasi manusia melalui misi kesadaran dengan tulisan sejarah.

## E. SIMPULAN

Wacana historiografi alternatif digulirkan sebagai respons terhadap ketidakbermanfaatannya historiografi yang selama ini berkembang. Historiografi pembebasan menawarkan orientasi untuk menyoroti persoalan-persoalan ketidakadilan dan eksploitasi yang bersifat aktual dalam

masyarakat, yang seringkali justru dilanggengkan oleh para penulis sejarah. Dengan cara demikian, historiografi pembebasan diproyeksikan dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar yang mendasar guna memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa untuk menuju kejayaannya di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn, Simon. 1994. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Collingwood, R.G. 1973. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press.
- Croce, B. 1959. "History and Cronicle", dalam Hans Meyerhoff, *The Philosophy of History in Our Time: An Anthology*. New York: Anchor Original Publisher.
- Curaming, Rommel. 2003. "Towards Reinventing Indonesian Nasionalist Historiography". Paper.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Piliang, Indra. "Historiografi Kita" dalam *Majalah Panji*, 5 September 2001.
- Purwanto, Bambang. "Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: 28 September 2004.
- Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. 2005. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Yogyakarta: Ombak.
- Sulistiyono, Singgih T. 2008. "Historiografi Pembebasan Untuk Indonesia Baru", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*. Semarang: 2008.
- Wardaya, Baskara T. 2006. *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galang Press.
- Vikers, Adrian and Katharine E. McGregor. "Public Debates about History. Comparative Notes from Indonesia" in *History Australia*, Volume 2, Number 2, 2005. Monash University Press.
- "Sejarah Alternatif" [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_alternatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_alternatif) (2 November 2010).